

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keseriusan pemerintah saat ini terhadap sektor pertanian telah ditunjukkan dengan adanya penetapan pembangunan pertanian sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian kedepan, salah satunya melalui “Revitalisasi Pertanian”. Pembangunan pertanian erat kaitannya dengan pembangunan pedesaan. Pedesaan menjadi semakin penting bagi pembangunan nasional, hal ini dibuktikan dengan fenomena krisis moneter pada tahun 1997 yang juga melanda Indonesia, ekonomi pedesaan memiliki dampak yang sangat kecil dan mampu mempertahankan kesetabilan ekonominya. Dengan demikian sektor ekonomi dipedesaan dianggap memiliki kekuatan yang dapat menjadi daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi arus globalisasi (Adejuwon, 2012).

Terobosan yang dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak secara terarah dan terkoodinasi, salah satunya adalah dengan penetapan program terpadu yaitu pembangunan kawasan agropolitan. Agropolitan merupakan rumusan atau teori – teori yang mempunyai pendekatan terhadap pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian, dan atau pembangunan wilayah pertanian (Nogroho, 2008).

Kementerian Pertanian RI menetapkan 61 kawasan sebagai pengembangan kawasan agropolitan di beberapa Propinsi di Indonesia, salah satu kabupaten yang termasuk dalam penancangan kawasan agropolitan adalah Kabupaten Bangkalan (Panduan Umum Agropolitan, 2015). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan ditetapkan sebuah kawasan ekonomi khusus, yang menekankan pada ekonomi pedesaan dengan pertaniannya, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 520/2403/021.2/2005. Kawasan tersebut meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Socah, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Bangkalan, yang di kenal dengan sebutan kawasan Agropolitan SOBURBANG.

Menurut Bappeda Kabupaten Bangkalan (2012), dalam rancangannya Bangkalan akan dijadikan daerah penyangga kegiatan pertanian, melalui peningkatan produksi komoditas unggulan. Salah satu caranya yaitu dalam 20 tahun ke depan lahan sawah di Bangkalan akan di tingkatkan dari 8.000 Ha menjadi 30.000 Ha. Hal ini masih bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, jika dilihat dari PDRB sektor pertanian di Bangkalan dalam 5 tahun terakhir yaitu, pada tahun 2009 32,52%, tahun 2010 31,92%, 2011 30,19%, 2012 28,90%, 2013 28,09%. Dilihat dari presentase diatas setiap tahunnya PDRB pada sektor pertanian selalu mengalami penurunan (BPS, 2015).

Sejak ditetapkan tahun 2005 lalu, implementasi agropolitan dari pemerintahan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Keseriusan serta lemahnya kordinasi antar SKPD menjadi faktor utama, serta kurangnya sosialisasi program sehingga banyak masyarakat di kawasan agropolitan yang kurang mengetahui adanya program agropolitan. Sistem permodalan petani yang lemah, belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok tani, harga jual komoditi yang menambah daftar panjang catatan permasalahan pada pengembangan agropolitan.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya instansi (lembaga) terkait mulai dari level pemerintah daerah sampai pada level pemerintah desa, untuk membenahi kembali kelemahan – kelemahan yang dirasa menjadi faktor belum efektifnya program agropolitan di Bangkalan. Menurut Agusta (2007) lembaga menempati posisi paling mendasar untuk mengembangkan potensi individu maupun kelompok pemanfaat serta solidaritas antar pihak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sutarto *et al* (2010) bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan kedepan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan yang didasari pada pengembangan ekonomi lokal. Maka dari itu perlu adanya upaya peningkatan peranan dan kinerja lembaga terkait agar program tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, karena lembaga erat kaitannya dengan proses berjalannya program, baik sebagai penggerak maupun sebagai penentu arah dari kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk mensinergikan lembaga yang terkait dirasa perlu melakukan penelitian terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi lembaga apa saja yang berperan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peranan dari masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan Pengembangan Kawasan Aropolitan di Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana peran dan hubungan antar lembaga yang baik pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui lembaga yang berperan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui peran dari masing-masing lembaga terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Aropolitan di Kabupaten Bangkalan.
3. Merumuskan rekomendasi pembenahan peran dan hubungan antar lembaga dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian di atas adalah :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam menentukan kebijakan yang tepat.
2. Bagi masyarakat, untuk mengetahui dan menambah informasi tentang pengembangan kawasan agropolitan, serta peranan lembaga terkait terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
3. Bagi Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa yang dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.
4. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi penelitian lain yang lebih lanjut, terutama yang menyangkut Pengembangan Kawasan Agropolitan.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanyalah bersifat kualitatif, untuk mengetahui peran dan fungsi dari lembaga terkait pada program pengembangan agropolitan di Kecamatan Socah, Kabupaten bangkalan.
2. Dilakukan observasi pada dinas – dinas terkait untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat jalannya program agropolitan di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
3. Membentuk rekomendasi pembenahan peran dan hubungan antar lembaga, untuk tercapainya kinerja yang efektif pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan.